

ABSTRAK

Fenomena penggunaan jasa *buzzer* semakin marak digunakan sebagai alat guna melakukan ujaran kebencian oleh berbagai pihak tertentu. Hal ini mengakibatkan munculnya profesi baru yaitu penyedia jasa *buzzer* yang berperan dalam mengorganisir, mengkoordinasikan untuk memengaruhi opini publik dengan menyebarkan narasi tertentu, termasuk komentar bernada kebencian yang sering kali bertujuan untuk menjatuhkan reputasi seseorang, menghasut konflik, atau menyebarkan propaganda dengan menerima bayaran yang disepakati sebagaimana sesuai dengan permintaan klien. Tujuan penelitian ini dilakukan guna menganalisis kualifikasi pidana terhadap profesi penyedia jasa *buzzer* sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana ujaran kebencian, baik secara individu maupun kelompok

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris dengan mode pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini berfokus untuk mengamati berlakunya hukum dalam peristiwa dan fenomena pada kenyataan di masyarakat. Pada penelitian ini data diperoleh melalui upaya observasi, kuisioner dan studi dokumentasi. Hasil dari perolehan data kemudian akan diolah dengan metode analisa data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas yang terorganisir untuk menyebarkan narasi tertentu, termasuk narasi kebencian. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP, peran pemesan, perantara, dan *buzzer* dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana. Selain itu, penggunaan Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pidana. Sehingga, penyedia jasa *buzzer* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sadar dan bersama-sama menyusun serta menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Buzzer*, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pasal 55 KUHP, UU ITE.

ABSTRACT

The phenomenon of the use of buzzer services is increasingly being used as a tool to carry out hate speech by certain parties. This has resulted in the emergence of a new profession, namely buzzer service providers who play a role in organizing, coordinating to influence public opinion by spreading certain narratives, including hateful comments that often aim to destroy someone's reputation, incite conflict, or spread propaganda by receiving agreed payment as requested by the client. The purpose of this study was to analyze the criminal qualifications of the profession of buzzer service providers as perpetrators who participate in hate speech crimes, both individually and in groups.

The type of research in this thesis is empirical legal research with a sociological legal approach mode (socio-legal approach) and a statutory approach (statute approach). This approach focuses on observing the application of law in events and phenomena in reality in society. In this study, data was obtained through observation, questionnaires and documentation studies. The results of the data acquisition will then be processed using descriptive data analysis methods.

The results of the study show that the division of tasks is organized to spread certain narratives, including hate narratives. Based on Article 55 paragraph (1) 1 and 3 of the Criminal Code, the role of the orderer, intermediary, and buzzer can be qualified as co-conspirators (medepleger) in criminal acts. In addition, the use of Article 27A and Article 28 paragraph (2) of the ITE Law as the legal basis for criminal liability. Thus, buzzer service providers can be held criminally liable if proven to have consciously and jointly compiled and distributed content containing hate speech.

Keywords: Criminal Liability, Buzzer, Hate Speech, Social Media, Article 55 of the

Criminal Code, ITE Law.